

ANALISA YURIDIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo
No: 163/PID. B/2012/ PN. SDA)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



OLEH:
ERYOGA PRATAMA SANTOSO
NPM. 0871010022

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
ANALISA YURIDIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO
NO: 163/PID. B/2012/ PN. SDA)

Disusun oleh :

ERYOGA PRATAMA SANTOSO
NPM. 0871010022

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing

H. SUTRISNO, SH. M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO.S.H.,MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI
ANALISA YURIDIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo
NO: 163/PID. B/2012/ PN. SDA)

Disusun oleh :
ERYOGA PRATAMA SANTOSO
NPM. 0871010022

Telah direvisi oleh penyusun setelah mengikuti ujian
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal : 21 JUNI 2013

Pembimbing

1.

H. SUTRISNO, SH. M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Tim Penguji:

1.

H. SUTRISNO, SH. M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

2.

FAUZUL ALIWARMAN. SHI., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

3.

MAS ANIENDA TF, SH., MH.
NPT. 3 7 709070 223

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO.S.H.,MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISA YURIDIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo
NO: 163/PID. B/2012/ PN. SDA)

Disusun oleh :
ERYOGA PRATAMA SANTOSO
NPM. 0871010022

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal : 05 JUNI 2013

Pembimbing

2.

H. SUTRISNO, SH. M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Tim Penguji:

1.

H. SUTRISNO, SH. M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

2.

FAUZUL ALIWARMAN. SHI., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

3.

MAS ANIENDA TF, SH., MH.
NPT. 3 7 709070 223

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO.S.H.,MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Eryoga Pratama Santoso
Tempat/ tanggal lahir	: Surabaya / 24 Juni 1989
NPM	: 0871010022
Kosentrasi	: Pidana
Alamat	: Jl. Aspol Wage I / 18, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “ANALISA YURIDIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO: 163/PID. B/2012/ PN. SDA)” Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar asli karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini yang saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Pembimbing

Surabaya, juni 2013
Penulis

H. SUTRISNO, SH. M.Hum.
NIP: 19601212 198803 1 001

ERYOGA PRATAMA SANTOSO
NPM: 0871010022

KATA PENGANTAR

Puji syukur pertama-tama penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang selalu menyertai penulis selama menuntut ilmu pengetahuan pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, khususnya dalam penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISA YURIDIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo NO. 163/PID. B /2012/ PN. SDA) “ sebagai kelengkapan serta memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Disamping itu penulis menyadari bahwa selesainya penulisan skripsi ini adalah karena bantuan dan dukungan baik berupa moril dan materiil yang sangat berharga dari berbagai pihak dalam hubungan langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Haryo Sulistyantoro. SH. MM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan I, Selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang tulus ikhlas membantu terselesainya skripsi ini di tengah kesibukan beliau di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs.Ec Gendut Soekarno.,M.S. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak SUBANI. SH. M.Si. selaku Ketua Program Studi Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. SITAWATI SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang telah memberikan keterangan guna terselesaikannya skripsi ini.
6. KISTOYO SH selaku panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo yang telah memberikan masukan guna terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Djatmiko selaku Pegawai Tata Usaha di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang telah membantu memberikan banyak keterangan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak YULI SH Selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang membantu pelaksanaan penelitian skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini di tengah kesibukan beliau.
9. Bapak Wachid SH selaku Jaksa Penuntut Umum Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo yang telah memberikan masukan dan data hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Bapak IPTU YUYUS ANDRIASTANTO. SH. Selaku kanit PIDUM POLRES Sidoarjo yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian serta memberikan banyak keterangan dan data dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak/Ibu dosen dan semua karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya yang telah memberikan Bekal Ilmu Pengetahuan.
12. Para Staf-Staf Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya yang telah membantu penulis dalam memenuhi keperluan administrasi, akademik sehingga penulis lancar.

13. Kedua Orang Tua (Suko Santoso dan Ery Sujarwo), yang telah memberikan Doa serta arahan-arahan dari kecil sampai dengan saat ini dan dukungan positif selama penulisan skripsi ini berlangsung.
14. Suci Wahyudita Wulandari, yang telah memberikan semangat, doa, serta dukungan yang luar biasa besar selama penulisan skripsi ini berlangsung.
15. Hervawan Eka Juliana S.Psi M.Psi yang telah memberi dorongan dan motivasi selama penulisan skripsi ini berlangsung.
16. Seluruh teman-temanku sealmamater Fakultas Hukum khususnya Angkatan 2008 atas segala bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna karena kemampuan dan pengetahuan penulis sangatlah terbatas, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik tentang penulisan skripsi ini untuk dapat mencapai kesempurnaan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta pembaca khususnya dalam kalangan perguruan tinggi dimana penulis berkecimpung di dalamnya.

Surabaya, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Tinjauan Pustaka.....	5
1.5.1. Hukum Pidana.....	5
1.5.2. Pengertian Tindak Pidana	6
1.5.3. Perbedaan Tindak Pidana	9
1.5.4. Tindak Pidana Kejahatan.....	10
1.5.5. Tindak Pidana Pembunuhan	12
1.5.6. Pembunuhan Berencana	20

1.5.7. Pertanggungjawaban Pidana.....	21
1.5.8. Kesalahan.....	25
1.5.9. Tahapan Beracara di Pengadilan Negeri (dalam KUHAP).....	28
1.5.10. Tuntutan dan Dakwaan.....	28
1.5.11. Penetapan dan Putusan Pengadilan	29
1.5.12. Pengertian Terdakwa, Saksi, Keterangan Saksi Korban	29
1.6. Metode Penelitian	30
1.6.1. Jenis Penelitian.....	31
1.6.2. Sumber Data.....	32
1.6.3. Metode Pengumpulan Data.....	33
1. Penelitian kepustakaan.....	33
2. Wawancara.....	34
1.6.4. Metode Analisis Data	34
1. 7. Sistematika Penulisan	35
 BAB II TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM	
PERKARA NOMOR : 163/PID.B/2012/PN.SDA.....	37
2.1. Implementasi Penegakkan Hukum Oleh Jaksa	37
2.2. Alasan Jaksa Penuntut Umum Untuk Menuntut Terdakwa Dalam Putusan Perkara No: 163/PID.B/2012/PN.SDA	38
 BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN	
PERKARA NOMOR : 163/PID.B/2012/PN.SDA.....	45
3.1. Alasan Hakim Menuntut Terdakwa Dalam Perkara No: 163/ PID.B/2012/PN.SDA	45

3.1.1. Pertimbangan Yuridis Hakim	46
3.1.2. Pertimbangan Non Yuridis Hakim.....	51
3.2. Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Dalam Perkara No: 163/ PID.B/2012/PN.SDA	52
3.2.1. Definisi Putusan	52
3.2.2. Isi Putusan Hakim	53
BAB IV PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan.....	56
4.2. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Penugasan Pembimbing Proposal Skripsi
- Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3. Surat Ijin Survey dari Pengadilan Tinggi Surabaya
- Lampiran 4. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- Lampiran 5. Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan
- Lampiran 6. Petikan Putusan
- Lampiran 7. Putusan No:163/PID.B/2012/PN.Sda

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Eryoga Pratama Santoso
Npm : 0871010022
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 24 juni 1989
Program Study : Pidana
Judul Skripsi :

ANALISA YURIDIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NO:
163/PID. B/2012/ PN. SDA)

ABSTRAKSI

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui alasan tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara No:163/PID.B/2012/PN.SDA di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No:163/PID.B/2012/PN.SDA di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber data diperoleh dari literatur, Undang-undang dan wawancara terhadap hakim dan jaksa tempat terjadinya perkara. Analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menguraikan, menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis tentang realita pembunuhan berencana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ringan terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana. Hasil penelitian ini adalah bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah Melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan No:163/PID.B/2012/PN.SDA telah sesuai karena berdasarkan pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, diperkuat dengan keyakinan hakim.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana
Pembunuhan, Berencana

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi yang membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang timbul adalah semakin maju dan makmur kondisi sosial ekonomi maupun politiknya, sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain adalah kesenjangan dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan rasa iri atau dengki yang mengakibatkan adanya masalah sosial seperti agresivitas di masyarakat, dan masalah yang menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan social. Masalah kesenjangan yang juga memicu tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan.

Dewasa ini dalam upaya menjamin terpeliharanya stabilitas nasional yang mantap untuk mendukung pelaksanaan pembangunan maka pemerintah telah melakukan berbagai berupa perlindungan secara hukum untuk mewujudkan rasa aman. Negara menjamin perlindungan terhadap nyawa setiap warga negaranya, dari yang ada dalam kandungan sampai yang akan meninggal. Tujuannya adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya yang dilakukan dengan cara merampas nyawa orang lain (pembunuhan).

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan dapat dijumpai pengaturannya dalam Pasal 338

KUHP, dan kejahatan ini dinamakan *makar mati* atau pembunuhan. Di sini dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP merumuskan delik secara materiil, hal tersebut diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu matinya orang lain.

Kedua macam hubungan itu adalah:

1. Hubungan dalam alam kenyataan, yaitu hubungan kausal antara perbuatan (membunuh) dengan matinya orang (yang dibunuh).
2. Hubungan dalam alam batin (hubungan subjektif), bahwa terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan matinya orang lain.¹

Masalah-masalah yang menyangkut dua hal tersebut di atas cukup sering terjadi di masyarakat, sebagaimana beberapa berita di media cetak maupun elektronik mengenai kasus pembunuhan baik yang merupakan pembelaan diri maupun pembunuhan terencana (*moord*). Adanya permasalahan tentang pembunuhan terencana inilah penulis tergerak melakukan observasi dan pembelajaran untuk mengkaji kasus pembunuhan berencana dalam lingkup pengadilan Negeri Sidoarjo.

Untuk kasus pembunuhan berencana ini telah diatur oleh ketentuan Pasal 340 KUHP yang berisikan sebagai berikut.

¹Hermin Hadiati Koeswadi, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Surabaya, Sinar Wijaya, 1984, Cet Ke I, hal. 21-22.

Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, PN Sidoarjo pada 21 Juni 2012 telah mengeluarkan putusan pada kasus seorang pria 41 tahun membunuh temannya dengan alasan dendam dan mimpi beberapa kali ditemui istrinya yang telah meninggal. Menurut pengakuan Pria yang menjadi terdakwa tersebut, semasa hidup istrinya sering dipaksa melayani nafsu seks korban. Dalam pembelaannya, terdakwa menyatakan membunuh korban karena dendam, bahwa mendiang istrinya sering digoda dan dipaksa melayani kebutuhan seksual korban. Terdakwa menyatakan sejak lama ingin membunuh korban.

Akibat yang diderita korban sampai meninggal dunia maka pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup menurut Pasal 340 KUHP dan aturan KUHAP. Sebagaimana latar belakang permasalahan yang dikemukakan, terdakwa dijerat Pasal 340 subsidair 380 tentang pembunuhan berencana, dengan sanksi penjara 12 tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang “ANALISA YURIDIS KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo NO: 163/PID. B/2012/ PN. SDA)”

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara No:163/PID.B/2012/PN.SDA?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No:163/PID.B/2012/PN.SDA di Pengadilan Negeri Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan hal-hal yang mendasari jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa dalam putusan perkara No:163/PID.B/2012/PN.SDA di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No:163/PID.B/2012/PN.SDA di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis
 1. Menambah wawasan tentang kepastian hukum dalam pelaksanaannya oleh para penegak hukum.
 2. Menambah wawasan tentang penerapan KUHP, terutama berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana.
 3. Menjadi dasar dan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

b. Secara praktis

1. Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memperjelas sanksi hukum yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai KUHP.
2. Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu hukum berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dengan berencana sehingga memberikan kesadaran mendalam dan tidak melanggarnya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Hukum Pidana

Memberikan deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah. Sebab, suatu pengertian yang diberikan para ahli tentang pengertian hukum pidana akan berkaitan dengan cara pandang, batasan dan ruang lingkup dari pengertian tersebut. Tidak mengherankan jika dijumpai banyak sekali pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana yang berbeda antara satu dengan yang lain. Moeljatno mengartikan hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.²

²Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, Cet.ke I. hal.1.

Andi Zainal Abidin mengartikan hukum pidana meliputi; pertama, perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang, peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang. Kedua, ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Ketiga, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.³

1.5.2 Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebut “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kata *strafbaar feit* tersebut. maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.⁴

Ada beberapa pakar, dalam menyebutkan kata “tindak pidana” menggunakan istilah-istilah lain, seperti delik (*delictum*), perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum. Istilah delik berasal dari bahasa latin yaitu *delict*, *delicta* atau *delictum*. Delik adalah merupakan istilah teknik yuridis yang hingga saat ini kalangan sarjana hukum belum ditemukan persamaan

³A.Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Jakarta , Sinar Grafika, 2007, Cet.ke-2. hal.7.

⁴Hukum Pidana, <http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>, diakses pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013 , 19:00 WIB.

pendapat mengenai pengakuan istilahnya dalam bahasa Indonesian, sedangkan delik dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* yang banyak digunakan oleh sarjana hukum, diantaranya yang menerjemahkan dengan perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.

Adanya perbedaan mengenai istilah *strafbaarfeit* disebabkan belum ada terjemahan resmi *Wetboek van Strafrecht* dari bahasa Belanda kebahasa Indonesia. A. Zainal Abidin Farid memakai istilah peristiwa pidana, belum menyetujui kalau perkataan *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan pidana, karena berbicara dalam ruang lingkup hukum secara umum. Moeljatno merumuskan delik adalah “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Selanjutnya Rusli Effendy, merumuskan peristiwa pidana adalah “suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana atau hukum pidana, sebabnya saya memakai hukum pidana ialah karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis”.⁵

Tresna merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut:

Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan diadakan tindakan pembedaan.⁶

⁵Rusli Effendy, *Asas Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang : Leppen UMI, 1989, hal. 55.

⁶*Ibid.*, hal. 55.

Mengenai definisi “delik atau tindak pidana” (*strafbaar feit*) dapat dilihat menurut pendapat pakar-pakar, antara lain:

- a. Moeljatno, mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁷

Moeljatno, memakai istilah “perbuatan pidana” dan beliau tidak setuju dengan istilah “tindak pidana” karena menurut beliau “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan”, tapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit.⁸

- b. E.Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana⁹
- c. Mr.Tirtaamidjaja memakai istilah “pelanggaran pidana”.
- d. Sedangkan Leden Marpaung, memakai istilah delik untuk *strafbaar feit* agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak tepat.
- e. Menurut D.Simon, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.¹⁰

⁷A.Zainal Abidin Farid, *Op.cit.*, hal. 97.

⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal.

7.

⁹*Ibid.*,

¹⁰*Ibid.*, hal. 8.

- f. Akan tetapi, strafbaar feit itu oleh HOGE RAAD juga pernah diartikan bukan sebagai “suatu tindakan” melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan, dimana HOGE RAAD telah menjumpai sejumlah tindak pidana di bidang perpajakan yang terdiri dari peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan, di mana seseorang itu harus dipertanggungjawabkan atas timbulnya peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan tersebut tanpa ia telah melakukan sesuatu kealpaan atau tanpa adanya orang lain yang telah melakukan suatu kealpaan, hingga ia harus dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.

Dari beberapa rumusan tentang delik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana di atas dapat disimpulkan bahwa delik adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang karena merupakan perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

1.5.3 Perbedaan Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.¹¹ Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan

¹¹Mahrus Ali, Op.Cit, hal. 101.

pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.¹²

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi jenis tindak pidana ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.¹³

1.5.4 Tindak Pidana Kejahatan

Pengertian Tindak Pidana lebih luas dari pada kejahatan. Kejahatan dalam hukum pidana adalah perbuatan pidana yang pada dasarnya diatur di dalam Buku II KUHP dan di dalam aturan-aturan lain di luar KUHP yang di dalamnya dinyatakan perbuatan itu sebagai kejahatan. Perbuatan pidana lebih luas dari kejahatan, karena juga meliputi pelanggaran, yaitu perbuatan yang diatur dalam Buku III KUHP dan diluar KUHP yang di dalamnya dinyatakan perbuatan itu sebagai pelanggaran. Di dalam buku II KUHP, sejumlah kejahatan-kejahatan dibagi kedalam beberapa golongan, dan untuk tiap-tiap golongan ditempatkan atau dikelompokkan dibawah satu bab

¹²Ibid.,

¹³Ibid., hal. 102.

atau judul dengan diberi nama sendiri-sendiri.¹⁴ Berikut adalah contoh bab-bab dari kejahatan:

- a. Bab Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Ps. 104-129 KUHP)
- b. Bab VI. Tentang Perkelahian Tanding (pasal 185-186 KUHP)
- c. Bab VII. Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang atau Barang (pasal 187-206 KUHP)
- d. Bab XIV. Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Ps. 281-303 bis KUHP)
- e. Bab XV. Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong (Ps. 304-309 KUHP)
- f. Bab XVI. Penghinaan (Ps. 310-321 KUHP)
- g. Bab XVII. Membuka Rahasia (Ps. 322-323 KUHP)
- h. Bab XVIII. Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang (Ps. 324-337 KUHP)
- i. Bab XIX. Kejahatan Terhadap Nyawa (Ps. 338-350 KUHP)
- j. Bab XX. Penganiayaan (Ps. 351-358 KUHP)
- k. Bab XXI. Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan (Ps. 359-361 KUHP)
- l. Bab XXII. Pencurian (Ps. 362-367 KUHP)
- m. Bab XXIII. Pemerasan dan Pengancaman (Ps. 368-371 KUHP)
- n. Bab XXIV. Penggelapan (Ps. 372-377 KUHP)

¹⁴Hermin Hadiati Koeswadi, Op.cit., hal. 6.

- o. Bab XXV. Perbuatan Curang (Ps. 378-395 KUHP)

1.5.5 Tindak Pidana Pembunuhan

Secara prinsip, penggolongan berbagai tindak pidana dalam KUHP didasarkan pada kepentingan umum yang ingin dilindungi, yaitu Pasal 338 Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Menurut Leden Marpaung, menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “pembunuhan”. Tindak pidana ini termasuk delik materiil (material delict),¹⁵ artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu. Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang dalam tindak pidana pembunuhan merupakan syarat mutlak.

Tindak pidana terhadap “nyawa” dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu: atas dasar kesalahannya dan atas dasar obyeknya (nyawa).

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil, yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang

¹⁵Ibid., hal. 21.

menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat KUHP adalah sebagai berikut:

a. Pembunuhan/ Murder (Pasal 338 KUHP).

Hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun”

Unsur-unsur pembunuhan adalah:

- 1 Barangsiapa
- 2 Dengan sengaja

b. Pembunuhan dengan pemberatan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP yang berbunyi:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya dari pada hukuman, atau supaya barang yang didapatnya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”

Unsur-unsur pembunuhan dengan pemberatan adalah:

1) Objektif:

- (a) Unsur pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP baik unsur yang subjektif (dengan sengaja) maupun objektif (menghilangkan nyawa orang lain)
- (b) Unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.

2) Subjektif:

- (a) Unsur dengan maksud:
 - i. Untuk mempersiapkan tindak pidana lain.
 - ii. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
 - iii. Dalam hal tertangkap tangan, ditunjuk untuk Menghindarkan diri sendiri atau peserta lain dari pidana dan Memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum.
- b. Pembunuhan berencana/ Moord sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya 20 tahun”

Unsur-unsur pembunuhan berencana adalah:

1) Unsur objektif:

(a) Menghilangkan atau merampas nyawa orang lain

2) Unsur subjektif:

(a) Unsur dengan sengaja

(b) Unsur dengan rencana terlebih dahulu (voorbedachte rade)

c. Pembunuhan bayi oleh ibunya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal

341 KUHP yang berbunyi:

“seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dihukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun”

Unsur-unsur pembunuhan (biasa) anak adalah:

1) Unsur objektif:

(a) Seorang ibu

(b) Karena takut akan ketahuan melahirkan anak

(c) Pada saat anak dilahirkan

(d) Tidak lama kemudian (setelah dilahirkan)

(e) Merampas nyawa anak itu

2) Unsur subjektif:

(a) Dengan sengaja

d. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana/ sesuai yang diatur

dalam Pasal 342 KUHP yang berbunyi:

“seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak

lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu dihukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun”

Unsur-unsur pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana adalah:

1) Unsur objektif:

- (a) Seorang ibu
- (b) Adanya niat yang sudah ditentukan sebelumnya
- (c) Karena takut akan ketahuan melahirkan anak
- (d) Pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian setelah anak dilahirkan
- (e) Merampas nyawa anaknya¹⁶

2) Unsur subjektif:

- (a) Dengan sengaja.

e. Pembunuhan atas permintaan sendiri/ yang bersangkutan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 344 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”

Unsur-unsur pembunuhan atas permintaan sendiri adalah:

- 1) Unsur menghilangkan atau merampas nyawa orang lain
- 2) Atas permintaan orang itu sendiri
- 3) Yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati

¹⁶Ibid., hal. 65.

- f. Penganjuran/ membujuk/ membantu orang agar bunuh diri sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 345 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri”

Unsur-unsur penganjuran agar bunuh diri adalah:

- 1) Unsur objektif, yang terdiri dari:
 - (a) Mendorong orang lain untuk bunuh diri
 - (b) Menolong orang lain untuk bunuh diri
 - (c) Memberikan sarana untuk bunuh diri
 - (d) Orang tersebut jadi bunuh diri
- 2) Unsur subjektif:
 - (a) Dengan sengaja.

- g. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP)

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata abortus provocateur yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan “membuat keguguran”. Hal ini diatur dalam Pasal 346 KUHP yang berbunyi:

“perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun”

Unsur-unsur pengguguran kandungan dengan izin ibunya adalah:

1. Perempuan
 2. Menggugurkan
 3. Mematikan
 4. Menyuruh orang lain menggugurkan
 5. Menyuruh orang lain mematikan kandungannya sendiri
 6. Dengan sengaja¹⁷
- h. Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 347 KUHP yang berbunyi:
- (1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.
 - (2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun.”

Unsur-unsur pengguguran kandungan tanpa izin ibunya adalah:

- 1) Unsur objektif, yang terdiri dari unsur:
 - (a) Menggugurkan kandungan seorang perempuan
 - (b) Mematikan kandungan seorang perempuan
 - (c) Tanpa persetujuan perempuan itu
- 2) Unsur subjektif:
 - (a) Dengan sengaja

¹⁷Ibid., hal. 180.

i. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandung tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 348 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan
- (2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun”.

Unsur-unsur pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya adalah:

- 1) Unsur objektif, yang terdiri dari:
 - (a) Menggugurkan kandungan seorang perempuan
 - (b) Mematikan kandungan seorang perempuan
 - (c) Dengan persetujuannya
- 2) Unsur subjektif:
 - (a) Dengan sengaja.

j. Pengguguran kandungan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu (Pasal 349 KUHP). Dalam hal ini, dokter, bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan. Hal ini juga secara tegas diatur dalam Pasal 349 KUHP yang berbunyi:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan

yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”

1.5.6 Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.¹⁸

Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP

1. Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.
2. Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan keinsyafan untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (motif).
3. Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.

¹⁸Pembunuhan berencana, http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana, Diakses pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013, 08.00 WIB

Factor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan berencana

a. Politik

Dalam dunia politik sering kali terjadi pembunuhan berencana. Hal ini di karenakan adanya persaingan masing-masing individu dalam dunia politik.

b. Asmara

- Salah satu (baik pria maupun wanita) selingkuh
- Pasangan suka bertindak kasar

c. Dendam

- Pelaku pernah di sakiti oleh korban
- Pelaku pernah di hina korban

1.5.7 Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" adalah sanggup menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)¹⁹. Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dsb).

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana²⁰. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam

¹⁹Ananda Santoso, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama, Kartika, Surabaya, 1995, hal. 346.

²⁰Moeljatno.Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 1993, hal.155

melakukan perbuatan itu orang tersebut melakukan kesalahan²¹. Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.²²

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada pada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²³ Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana²⁴.

Dapat dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (liability based on fault), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan

²¹Mahrus Ali, Op.cit., hal. 155.

²²Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal.20-23.

²³Mahrus Ali, Op.cit., hal. 155.

²⁴Roeslan Saleh, Op.Cit., hal.75.

sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.

Dalam banyak kejadian, tindak pidana dapat terjadi sekalipun dilihat dari batin terdakwa sama sekali tidak patut dicelakan terhadapnya. Dengan kata lain, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan dan karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.

kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka haruslah :

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab

- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf²⁵

Dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan bahwa :

“Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya maka orang itu tidak dipidana.”

Jadi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggung jawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 KUHP, maka tidak dapat dipidana.

Prof. Mr. Roeslan Saleh mengatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu :

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah Melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan.

Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana, hal ini mengacu pada asas

²⁵Hasil Wawancara dengan Jaksa Wachid SH, pada hari Rabu, tanggal 8 mei 2013, jam 08.00

²⁶Roeslan Saleh., Op.Cit, hal.82

legalitas yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi “ tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan”.

Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat ataupun tidak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum. Kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan mana yang tidak.

Dengan kesengajaan atau kealpaan, terdakwa menghendaki akibat perbuatannya dan akibat itu menjadi tujuan akhir dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa sengaja sebagai tujuan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya

1.5.8 Kesalahan

Setiap orang dianggap mengetahui dan mengerti akan adanya Undang-Undang serta peraturan yang berlaku, sehingga setiap orang yang mampu memberi pertanggungjawaban pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya suatu peraturan perundang-undangan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya.

Adanya suatu kelakuan yang melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana, tetapi masih disyaratkan pembuat itu dapat di persalahkan (dipertanggungjawabkan) atas perbuatannya. Jadi untuk memidana seseorang, harus memiliki dua unsur, yaitu:

- a. Pembuat harus melawan hukum,
- b. Harus ada kesalahan

Kesalahan tersebut terbagi atas dua yaitu:

- a. Sengaja (*dolus*).

Berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dilakukannya (menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan berserta akibatnya).²⁷ Kata sengaja dalam Undang-Undang meliputi semua perkataan di belakangnya, termasuk di dalamnya akibat dari tindak pidana.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat dikualifikasikan kedalam tiga bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*ogmerk*).

Apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya dan akibat itu menjadi tujuan akhir dari perbuatannya atau dengan kata lain bahwa sengaja sebagai tujuan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya.

- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti.

Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya. Miasalnya A hendak membalas kematian ayahnya, ia mengambil keputusan untuk membunuh B (si pembunuh ayahnya)

²⁷Leden Marpaung, *Op.cit.*, hal. 13.

dengan cara meledakkan sebuah bom yang dengan sengaja diletakkan dibawah rumah B. A tahu atau yakin benar bahwa ledakkan itu selain akan menewaskan B, juga akan membuat mati istri dan anak-anak B yang tinggal bersama-sama dalam rumah itu. Kematian istri dan anak-anak B merupakan kesengajaan bentuk kedua, yakni kesengajaan dengan keinsafan pasti.²⁸

3) Kesengajaan dengan insyaf akan kemungkinan (Dolus Eventualis).

Terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya akan terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.²⁹ Misalnya: A selaku sopir bus antar kota mengemudikan bus dengan kecepatan tinggi, meskipun salah seorang penumpang telah memperingatkannya agar hati-hati, ia toh tidak mengurangi kecepatan sehingga pada waktu tikungan, bus tersebut terbalik, yang mengakibatkan penumpang S meninggal dan beberapa orang luka berat.

b. Kelalaian (culpa).

Istilah tentang kealpaan ini disebut “schuld” atau “culpa” yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”. Tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu: kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.³⁰

²⁸Ibid., hal. 17.

²⁹Mahrus Ali, Op.cit., hal. 175.

³⁰Leden Marpaung, Op.cit., hal. 25.

1.5.9 Tahapan Beracara di Pengadilan Negeri (dalam KUHAP)

- a. Panggilan dan dakwaan. (Pasal 145)
- b. Memutus sengketa mengenai wewenang mengadili. (Pasal 147-151)
- c. Acara pemeriksaan biasa (Pasal 152-182)
- d. Pembuktian dan Putusan dalam acara pemeriksaan biasa (Pasal 183-202)

1.5.10 Tuntutan dan Dakwaan

Surat tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan Rekusitor adalah surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya Surat Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/ penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan :

1. Surat Tuntutan harus disusun secara sistematis.
2. Harus menggunakan susunan tata bahasa indonesia yang baik dan benar
3. Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti.
4. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya.³¹

³¹4za, Surat Tuntutan Hukum Acara Pidana , <http://po-box2000.blogspot.com/2011/04/>, Diakses pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013, 19.00 WIB.

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.³²

1.5.11 Penetapan dan Putusan Pengadilan

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction voluntaria (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata”menetapkan”.³³

1.5.12 Pengertian Terdakwa, Saksi, Keterangan Saksi dan Korban

Menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (15),

³²Ali Poetry, surat Dakwaan Pengertian Surat Dakwaan, html, <http://aliranim.blogspot.com/2009/12/>, Diakses pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013, 19.00 WIB.

³³Tokimachi, Penetapan dan Putusan, <http://smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan/>, Di akses pada hari Sabtu tanggal 13 April 2013, 19.00 WIB.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sedangkan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, dan atau ia alami sendiri.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu (Pasal 1 ayat (27), undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 (Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) dikatakan, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan mengenai bagaimana data dan informasi diperoleh dalam melaksanakan penelitian. Sebelum menguraikan pengertian metode penelitian hukum, terlebih dahulu penyusun mengemukakan bahwa metodologi dapat diartikan sebagai logika dari arti penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang, ditangan. Metode penelitian pada hakekatnya merupakan

operasionalisasi dari metode keilmuan, dan dengan demikian maka penguasaan metode ilmiah merupakan persyaratan untuk dapat memahami jalan pikiran yang terdapat dalam langkah-langkah penelitian.³⁴

Secara operasional penelitian dapat berfungsi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang pembangunan, mengembangkan sistim dan peningkatan kualitas hidup manusia.³⁵ Keempat fungsi tersebut pada dasarnya berkaitan secara terintegrasi. Maka kegunaan penelitian adalah sebagai suatu bentuk yang diupayakan dan akan dihasilkan beberapa manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam hal praktik hukum.

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam mengerjakan skripsi ini antara lain:

1.6.1 Jenis penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.³⁶ Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum yaitu masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.³⁷

Menggunakan pendekatan normatif, tinjauan yuridis normatif yang dengan melakukan identifikasi terhadap isu – isu hukum yang kurang

³⁴Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 2010, hal. 7.

³⁵Ibid.,

³⁶Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hal. 93.

³⁷Ibid.,

berkembang dalam masyarakat, mengkaji penerapan – penarapan hukum dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli – ahli hukum terkait dan analisa kasus dalam dokumen – dokumen untuk memperjelas hasil penelitian kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain Sumber data sekunder, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.³⁸ Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :

A. Bahan hukum primer

Konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan Pembunuhan Berencana yang tercantum di dalam :

- a. KUHP, dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP

B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau

³⁸Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta, Granit, 2004, hal. 57.

pendapat para pakar hukum.³⁹ Bahan hukum sekunder ini sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian para pakar dan jurnal hukum.

C. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁰

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴¹

Dalam penelitian ilmu hukum, penyeleksian terhadap kepustakaan yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku ilmu hukum, akan tetapi juga melibatkan aturan perundang-undangan dan dokumen, baik dokumen resmi maupun berupa catatan.

Dalam hal ini penyusun akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang diperoleh dari mengumpulkan literatur hukum, internet, dan KUHP dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

³⁹Soerjono Soekanto, Op.cit., hal. 52.

⁴⁰Ibid.,

⁴¹Ibid., hal. 66.

2. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya diharapkan dapat memperoleh jawaban yang relevan dengan topik yang akan dikaji dalam penelitian.⁴²

Dalam prakteknya nanti penyusun akan melakukan wawancara langsung dengan hakim, jaksa, pengacara, beberapa pengamat hukum dan lembaga bantuan hukum yang pernah terlibat dalam proses pengadilan untuk kasus yang sama dengan topik yang diteliti, atau untuk kasus pembunuhan berencana sebagaimana KUHP dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

1.6.4 Metode Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menguraikan, menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis tentang realita pembunuhan berencana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ringan terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana. Selanjutnya dilakukan pengkajian secara substansial sesuai dengan permasalahan yang ada berdasarkan teori, asas, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akhirnya sampai pada kesimpulan.

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, sebagai suatu upaya menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang dipilih sebagai pencarian data adalah

⁴²Rianto Adi, Op.cit., hal. 72.

wilayah Sidoarjo, atau wilayah administratif dari institusi polri yang telah melakukan penyidikan atas kasus pembunuhan berencana.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mengungkapkan secara mendalam tentang pandangan dan konsep yang diperlukan dan akan diuraikan secara komprehensif sehingga dapat menjawab permasalahan. Keseluruhan sistematika yang ada dalam penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat terpisahkan. Pembagian sub bab ini dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam menguraikan permasalahan secara teoritis hingga akhirnya diperoleh kesimpulan dan saran. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Membahas permasalahan pertama yaitu, tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara No:163/PID.B/2012/PN.SDA. Bab ini dijabarkan dalam dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan mengenai implementasi penegakkan hukum oleh Jaksa. Sub bab yang kedua menjelaskan mengenai pertimbangan jaksa untuk menuntut terdakwa dalam putusan perkara No.163/PID.B/2012/PN.Sda.

Bab III, Membahas mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No.163/PID.B/2012/PN.Sda. Yang akan diuraikan

dalam dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai alasan hakim memutus perkara No.163/PID.B/2012/PN.SDA. Dan subbab kedua membahas putusan hakim terhadap terdakwa dalam perkara No.163/PID.B/2012/PN.Sda.

Bab IV, Penutup, penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam penulisan skripsi ini.